

**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi
pada Perusahaan Publik dalam Perspektif Keberlanjutan Sosial dan SDGs**

Rachmanita Putri Wiyandari¹, Endah Susilowati²

^{1,2} Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
Indonesia
Email: rachmanitaaptr@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v8i1.404>

Diterima: Maret 2025

Direvisi: Mei 2025

Diterbitkan: Juni 2025

ABSTRACT

This study examines the role of financial accountability and transparency in preventing corruption practices in public companies, while reviewing their contribution to social sustainability within the Sustainable Development Goals (SDGs) framework. The analysis focuses on three case studies: PT Indofarma Tbk, PT Pertamina (Persero), and PT Unilever Indonesia Tbk. A qualitative-descriptive approach, using document analysis of sustainability reports, financial statements, and official corporate publications. The findings reveal that weak internal oversight and the absence of anti-corruption mechanisms at PT Indofarma led to financial statement manipulation and state losses, hindering the achievement of SDG 3, 9, and 16. In contrast, PT Pertamina demonstrates governance improvements through the adoption of ISO 37001 and enhanced sustainability reporting, although corruption risks persist in strategic projects. Meanwhile, PT Unilever Indonesia applies progressive governance by integrating ESG strategies and adapting to public pressure, contributing to SDG 10, 12, 16, and 17. Theoretically, this research reinforces the relevance of Agency Theory, Accounting Behavior Theory, and Good Corporate Governance in analyzing corruption and accountability dynamics in the corporate sector.

Keywords: Accountability, Corruption, Corporate Governance, SDGs, Transparency

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah peran akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mencegah praktik korupsi pada perusahaan publik, sekaligus meninjau kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tiga studi kasus digunakan sebagai fokus utama, yaitu PT Indofarma Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Unilever Indonesia Tbk. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis dokumentasi melalui laporan keberlanjutan, laporan keuangan, dan publikasi resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal serta absennya mekanisme antikorupsi di PT Indofarma menyebabkan manipulasi laporan keuangan dan kerugian negara, sehingga menghambat pencapaian SDG 3, 9, dan 16. Sebaliknya, PT Pertamina menunjukkan perbaikan tata kelola melalui penerapan ISO 37001 dan penguatan pelaporan keberlanjutan, meskipun masih terdapat risiko korupsi pada proyek strategis. Sementara itu, PT Unilever Indonesia menerapkan tata kelola progresif dengan mengintegrasikan strategi ESG serta merespons tekanan publik secara adaptif, yang mendukung pencapaian SDG 10, 12, 16, dan 17. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi Teori Agensi, Teori Keperilakuan Akuntansi, dan Teori *Good Corporate Governance*.

Kata kunci: Akuntabilitas, Korupsi, SDGs, Transparansi, Tata kelola perusahaan

Wiyandari, R. P. & Susilowati, E. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi pada Perusahaan Publik dalam Perspektif Keberlanjutan Sosial dan SDGs. BAJ: Behavioral Accounting Journal, 8(1), 76-104. <https://doi.org/10.33005/baj.v8i1.404>

PENDAHULUAN

Di tengah upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, praktik korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya transparansi masih menjadi tantangan serius yang menghambat efektivitas tata kelola, baik di sektor publik maupun swasta (Anggraeni et al., 2023). Meskipun berbagai regulasi dan inisiatif telah diluncurkan untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan berintegritas, kenyataannya masih banyak entitas bisnis yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai transparansi dan tanggung jawab sosial ke dalam strategi korporasi mereka (Noyo et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan sosial yang seharusnya menjadi komponen penting dalam tata kelola perusahaan modern (La Ode, 2023). Tiga kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir yakni skandal korupsi dan manipulasi laporan keuangan di PT Indofarma, lemahnya transparansi dalam pengadaan proyek strategis di PT Pertamina, serta tantangan reputasi global yang dihadapi PT Unilever Indonesia akibat tekanan sosial atas isu geopolitik menjadi refleksi nyata bahwa akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tata kelola perusahaan di Indonesia (Anggraeni et al., 2023). Untuk memahami lebih jauh bagaimana korupsi dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan merusak tata kelola perusahaan, penting untuk mengulas terlebih dahulu dampaknya secara sistemik di Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dan paling kompleks dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara secara langsung, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menurunkan efisiensi pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan serta sektor swasta (Ilham, 2022). Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. (Rakhman et al., 2024).

Korupsi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada perusahaan karena mengakibatkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menurunkan efisiensi pasar, serta memperbesar biaya transaksi dan ketidakpastian (Turi & Muharram, 2023). Hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis kepentingan umum menjadi sarat dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan menurunkan kualitas kehidupan Masyarakat (Pitt et al., 2021).

Korupsi mengganggu proses distribusi keadilan dan pemerataan Pembangunan (Sombie, 2023). Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik seperti kesehatan,

pendidikan, dan infrastruktur sering kali tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan karena diselewengkan di berbagai lini birokrasi maupun pelaksanaan proyek. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun, dan masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas dasar yang memadai. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas kinerja masyarakat, terutama dalam hal produktivitas, kesehatan, dan partisipasi sosial (Lailatul Khikmah & Agus Purwanto, 2023).

Pemberantasan korupsi tidak hanya penting dalam aspek hukum dan moral, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang adil dan inklusif (Man, 2022). Pembangunan yang bersih dari korupsi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan memperkuat kohesi sosial. (Erna Hendrawati & Mira Pramudianti, 2020)

Mengatasi masalah korupsi bukanlah hal yang mudah, karena korupsi sudah menyebar luas dan sering dianggap sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum setelah korupsi terjadi, tetapi juga harus mencegahnya sejak awal dengan membangun sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan mengikuti prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) (Purwanti & Yuliati, 2022). Dalam hal ini, aspek pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci utama dalam mempersempit ruang gerak oknum yang ingin melakukan penyelewengan dana, baik di sektor publik maupun korporasi (Edoumiekumo, 2020).

Salah satu kasus korupsi yang mencuat ke publik dan menjadi perhatian luas adalah kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Indofarma, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri farmasi. Perusahaan ini terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan yang bernilai besar, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola keuangan perusahaan. Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal serta lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Perusahaan (Husainy et al., 2024)

PT Indofarma, sebagai entitas bisnis milik negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat, seharusnya menjadi contoh dalam hal integritas dan akuntabilitas. Namun kenyataannya, keterlibatan perusahaan dalam kasus korupsi justru

memperburuk persepsi publik terhadap BUMN dan melemahkan legitimasi sosial mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat bergantung pada sejauh mana perusahaan tersebut dapat menjalankan operasionalnya secara terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum (Samuel, 2022). Keterlibatan PT Indofarma dalam skandal keuangan tersebut membuktikan bahwa meskipun sebuah perusahaan memiliki misi sosial atau beroperasi dalam sektor yang bersifat publik, hal itu tidak serta-merta menjamin bebasnya perusahaan dari potensi penyelewengan. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bahwa tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, mekanisme kontrol internal yang efektif, serta budaya transparansi yang tertanam di seluruh level organisasi, risiko terjadinya korupsi akan tetap tinggi bahkan dalam perusahaan yang terlihat "berintegritas" (Singh & Rahman, 2021)

Kasus korupsi di PT Indofarma menjadi bukti konkret bahwa lemahnya sistem tata kelola, khususnya dalam hal akuntabilitas dan pengawasan keuangan, membuka celah besar bagi penyimpangan. Situasi ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme pertanggungjawaban yang kuat di setiap lini organisasi sebagai upaya preventif terhadap korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam konteks pengelolaan perusahaan yang sehat dan berintegritas.

Dalam pengelolaan perusahaan yang baik, akuntabilitas keuangan berarti setiap bagian atau orang di perusahaan punya tanggung jawab untuk menjelaskan secara jujur dan teratur bagaimana mereka menggunakan uang atau sumber daya, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Nopriyanto et al., 2025). Akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan melalui laporan keuangan tahunan, tetapi juga tercermin dari bagaimana keputusan-keputusan keuangan diambil secara etis, berdasarkan prosedur, serta dapat diaudit secara independen dan terbuka. Penerapan akuntabilitas menciptakan sistem kerja yang lebih disiplin, mencegah praktik manipulatif, serta mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan internal Perusahaan (Singh & Rahman, 2021)

Untuk memastikan akuntabilitas berjalan efektif, perusahaan perlu memiliki struktur pengawasan yang kuat, termasuk adanya sistem pelaporan pelanggaran, audit berkala, serta pelatihan etika kerja (Zuherman & Nurul, 2025). Dengan begitu, proses pertanggungjawaban bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang aktif. Akuntabilitas yang baik menuntut setiap pihak dalam organisasi untuk dapat

dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakannya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (Zeny Antika et al., 2020). Ketika prinsip ini diabaikan, celah untuk terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Hal ini terlihat dalam kasus PT Indofarma, di mana terjadi manipulasi laporan keuangan yang melibatkan direksi dan jajaran manajemen puncak. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan tidak berfungsinya sistem akuntabilitas secara menyeluruh. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng integritas perusahaan sebagai bagian dari BUMN yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan tata kelola yang bersih dan transparan. (Ramdan Lamala et al., 2023)

Di sisi lain, transparansi menjadi elemen kunci yang saling melengkapi akuntabilitas. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, baik keuangan maupun non-keuangan maupun kepada pemangku kepentingan (Aji & Kartono, 2022). Transparansi mencegah praktik manipulatif dan memungkinkan adanya pengawasan yang partisipatif dari pihak luar. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih sehat, mendorong budaya kerja yang jujur, serta memperkuat kredibilitas perusahaan di mata investor maupun masyarakat (Kurniawati et al., 2024). Transparansi mengharuskan perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi yang diminta, tetapi juga secara proaktif menyediakan data dan penjelasan yang relevan dengan kondisi aktual perusahaan (Mustafa & Nurul, 2023). Ketika prinsip ini diabaikan, potensi terjadinya kesalahpahaman, menyembunyian informasi, hingga praktik korupsi akan semakin besar. Hal ini tercermin dalam kasus PT Pertamina yang mendapat sorotan publik pada awal tahun 2025 berkaitan dengan dugaan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait spesifikasi BBM serta praktik blending ilegal, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar dan mencerminkan ketidakterbukaan dalam pelaporan distribusi serta proses pengadaan energi (Fitriani et al., 2025). Ketidakjelasan komunikasi serta lambatnya respons terhadap permintaan klarifikasi dari lembaga pengawas maupun masyarakat menunjukkan bahwa budaya transparansi dalam tata kelola perusahaan masih lemah dan belum menjadi prioritas utama (Dimitrova, 2022).

Selain itu, perusahaan masa kini juga dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, sosial, dan ekonomi, keberlanjutan (sustainability) menjadi bagian penting dalam praktik tata kelola modern (Arunkumar B, 2022). Keberlanjutan bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan,

berinteraksi dengan masyarakat, dan merancang strategi yang mampu bertahan dalam jangka panjang (Falk & Roh, 2022)

Prinsip keberlanjutan menuntut perusahaan untuk memperhatikan tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi prinsip ini dapat diwujudkan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, pemberdayaan komunitas lokal, serta penerapan model bisnis yang adil dan inklusif (Agwu & Bessant, 2021). Perusahaan yang konsisten menjalankan strategi bisnis berkelanjutan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, serta memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diamati secara nyata dalam praktik berbagai perusahaan, termasuk saat mereka menghadapi krisis reputasi. Prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka normatif, melainkan juga terbukti relevan dalam menjawab tantangan bisnis di lapangan (Aggarwal et al., 2020).

Salah satu contoh nyata adalah PT Unilever Indonesia, yang baru-baru ini menghadapi tantangan serius akibat gelombang boikot dari sebagian masyarakat Indonesia (Haq, 2021). Boikot ini merupakan respons atas persepsi keterkaitan perusahaan induk Unilever global dengan konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait dugaan dukungan terhadap Israel. Meski mengalami penurunan penjualan, terutama di wilayah mayoritas Muslim, Unilever Indonesia tetap berupaya menjalankan komitmen keberlanjutan melalui pelibatan UMKM lokal, efisiensi energi, pengurangan sampah plastik, dan penyesuaian strategi operasional yang responsif terhadap konsumen (Dania, 2025). Klarifikasi status halal produk serta komunikasi aktif di media sosial menjadi bentuk transparansi yang diperkuat, sementara pelaporan tahunan dan inisiatif sosial mempertegas akuntabilitas perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun tata kelola perusahaan yang terbuka dan bertanggung jawab (Wang et al., 2021).

Oleh karena itu, perusahaan seperti PT Pertamina, PT Unilever Indonesia, dan PT Indofarma memiliki tanggung jawab besar untuk membangun sistem tata kelola perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja finansial, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan secara utuh. Ketiga aspek ini merupakan pilar utama dalam membentuk organisasi yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya, bersikap terbuka terhadap pengawasan publik, dan menunjukkan kepedulian terhadap dampak sosial serta lingkungan

jangka Panjang (Haq, 2021). Dalam hal ini, akuntabilitas mendorong perusahaan untuk menjelaskan setiap keputusan secara etis, transparansi memastikan kepercayaan publik tetap terjaga melalui keterbukaan informasi, sementara keberlanjutan menjadi landasan strategis dalam menjaga kesinambungan usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab social (Haq, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat berperan dalam mencegah praktik korupsi, dengan mengambil studi kasus PT Indofarma, PT Unilever serta PT Pertamina sebagai fokus utama. Penelitian ini juga akan menelusuri keterkaitan antara tata kelola keuangan perusahaan dan upaya pencapaian tujuan keberlanjutan sosial dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tata kelola yang baik dalam membangun sistem bisnis yang bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas di Indonesia (Indarto et al., 2024).

TELAAH LITERATUR

Teori Keperilakuan Akuntansi (Accounting Behavior Theory)

Teori Keperilakuan Akuntansi menekankan bahwa praktik akuntansi, termasuk pengambilan keputusan perpajakan, sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan dinamika sosial dalam organisasi (Sari, 2021). Dalam kasus PT Indofarma dan PT Pertamina, teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan seperti manipulasi laporan dan korupsi terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan serta adanya tekanan jabatan atau motif pribadi (Mardiyanto, 2022). Budaya organisasi yang lebih fokus pada hasil dibanding proses etis turut memperparah deviasi etis yang terjadi (Ansori & Kuntadi, 2022).

Sementara itu, pada PT Unilever Indonesia, teori ini relevan dalam menganalisis respons perusahaan terhadap tekanan sosial akibat boikot publik. Penyesuaian strategi pelaporan, klarifikasi status halal, serta pelibatan UMKM lokal menunjukkan bahwa akuntansi juga merupakan respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan legitimasi publik (Bagus et al., 2023). Dalam konteks keberlanjutan dan SDG 16, teori ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam membentuk perilaku etis dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab (Sayekthi, 2022)

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi atau *agency theory*, adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik (principal) dan manajemen (agent), dalam konteks pengelolaan perusahaan (Lesmono & Siregar, 2021). Pemilik cenderung mengejar efisiensi dan keuntungan jangka panjang, sementara manajemen sering terdorong oleh insentif jangka pendek seperti bonus atau kompensasi (Faisal et al., 2020). Agency Theory menjadi relevan dalam menganalisis dinamika di PT Indofarma, PT Pertamina, dan PT Unilever Indonesia karena menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dan asimetri informasi memungkinkan agent bertindak menyimpang dari kepentingan principal. Kasus korupsi di PT Pertamina dan manipulasi laporan keuangan di PT Indofarma menunjukkan bahwa ketika kontrol internal tidak berjalan efektif, agent dapat menyalahgunakan kewenangan secara sistematis (TEKIN & POLAT, 2020).

Sementara itu, kasus boikot terhadap PT Unilever Indonesia memperlihatkan bentuk lain dari agency problem, yakni tekanan dari publik sebagai principal yang menuntut tanggung jawab sosial atas isu geopolitik. Ketika perusahaan tidak memberikan respons yang memadai, kepercayaan publik dapat runtuh dan berdampak pada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi mekanisme penting dalam memitigasi agency problem. Penerapan sistem pelaporan yang jujur, pengawasan internal yang kuat, serta keterlibatan aktif stakeholder merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih, berkelanjutan, dan responsif terhadap kepentingan publik (Zhu, 2021).

Teori Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sistem pengelolaan yang menekankan tanggung jawab, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi (Rachmatullah Putra, 2025). Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola yang jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga pembangunan dan pengelolaan perusahaan berjalan secara etis dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks kasus PT Indofarma, PT Pertamina, dan PT Unilever Indonesia, penerapan prinsip good governance menjadi sangat relevan. Lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di PT Indofarma dan Pertamina membuka ruang terjadinya manipulasi laporan keuangan dan korupsi besar-besaran. Sementara itu, respons manajemen PT Unilever yang kurang proaktif terhadap gelombang boikot menunjukkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan stakeholder.

Ketiga kasus ini menegaskan bahwa kegagalan menerapkan prinsip good governance dapat memicu krisis kepercayaan publik, risiko reputasi, dan mengancam keberlanjutan perusahaan

Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana secara jujur, sistematis, dan transparan (Pardomuan, 2024). Prinsip ini mencakup proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan keuangan yang memungkinkan audit dan evaluasi secara objektif. Dalam konteks perusahaan publik atau BUMN seperti PT Indofarma, akuntabilitas menjadi krusial karena dana yang dikelola berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan negara. Ketidakterpenuhinya prinsip ini berisiko menimbulkan korupsi, manipulasi laporan, dan hilangnya kepercayaan publik serta investor (Septiani Putri et al., 2023).

Penerapan akuntabilitas dilakukan melalui pelaporan berkala sesuai standar akuntansi, audit independen, sistem pengawasan internal, dan whistleblowing mechanism. Budaya etika juga harus ditanamkan dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Rano & Candra, 2022). Pelanggaran prinsip ini dalam kasus PT Indofarma, seperti manipulasi laporan keuangan dan rekayasa distribusi produk, mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas manajerial. Oleh karena itu, reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengendalian internal menjadi langkah strategis untuk memulihkan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang (Huckleberry, 2023).

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang mengharuskan organisasi, termasuk perusahaan, untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan terkait aktivitas, kebijakan, serta kinerja, terutama dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan operasional (Yeremia & Oka, 2020). Prinsip ini tidak hanya terbatas pada penyampaian data keuangan formal, tetapi juga mencakup penjelasan menyeluruh mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta pengungkapan risiko strategis yang dihadapi. Transparansi menjadi sangat penting dalam mendukung akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola dana publik dan memiliki tanggung jawab sosial luas terhadap masyarakat (Ramdan Lamala et al., 2023).

Ketika transparansi tidak dijalankan secara memadai, risiko penyalahgunaan wewenang semakin besar (Erna Hendrawati & Mira Pramudianti, 2020). Hal ini tampak dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina pada tahun 2024, di mana terjadi dugaan mark-up anggaran dalam proyek pembangunan kilang serta ketertutupan informasi dalam pelaporan biaya operasional. Respons yang lambat dari manajemen terhadap permintaan klarifikasi hanya memperkuat kecurigaan publik dan mencerminkan lemahnya praktik keterbukaan dalam tata kelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan transparansi dapat menghambat proses pengawasan eksternal dan sekaligus merusak legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Untuk mewujudkan transparansi yang efektif, perusahaan perlu menerapkan sistem komunikasi terbuka, menyediakan laporan keuangan dan non-keuangan secara berkala, membuka akses terhadap hasil audit dan evaluasi proyek, serta melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan Keputusan (Pardomuan, 2024). Jika prinsip transparansi ini diinternalisasi dan dijalankan secara konsisten, maka potensi penyimpangan dapat ditekan, dan kepercayaan terhadap perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (Nopriyanto et al., 2025).

Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, yang merugikan kepentingan publik dan organisasi. Secara umum, korupsi mencakup praktik seperti suap, penggelapan, nepotisme, kolusi, dan manipulasi laporan keuangan (Bukhary et al., 2021).

Dalam konteks PT Indofarma, sebagai perusahaan milik negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan produk farmasi dan layanan kesehatan bagi masyarakat, korupsi menjadi masalah serius yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up harga pengadaan, hingga kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan, tetapi juga menghambat pelaksanaan fungsi sosialnya, bahkan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kasus korupsi di PT Indofarma mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penguatan sistem pengendalian internal, serta pelibatan aktif pemangku kepentingan (Sayekthi, 2022). Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),

khususnya tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, akuntabel, dan bebas dari korupsi (Mishra et al., 2024).

Keberlanjutan Sosial (Social Sustainability)

Keberlanjutan sosial merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat, dengan menekankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pelibatan para pemangku kepentingan secara aktif dan inklusif (Iyengar, 2024).

Dalam konteks tata kelola perusahaan, keberlanjutan sosial penting karena mendorong akuntabilitas, transparansi, dan integritas sebagai strategi pencegahan terhadap perilaku menyimpang, seperti korupsi (Selvakumar, 2025). Konsep ini tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan sosial, tetapi juga menekankan pentingnya nilai etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan korporasi. Penerapan keberlanjutan sosial menjadi relevan dalam kasus PT Unilever Indonesia, yang mengalami tekanan publik berupa boikot akibat persepsi keterlibatan perusahaan induknya dalam konflik geopolitik di Timur Tengah. Peristiwa tersebut mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap komitmen sosial dan etika perusahaan. Dalam situasi ini, keberlanjutan sosial menuntut perusahaan untuk tidak hanya memberikan respons defensif, tetapi juga secara aktif melibatkan stakeholder, membangun komunikasi yang transparan, dan menunjukkan integritas dalam menyikapi isu-isu sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan sosial berfungsi sebagai alat evaluasi strategis yang membantu perusahaan mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik di tengah tantangan sosial yang terus berkembang (Singh & Rahman, 2021).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya sistematis dan kolektif untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera melalui tata kelola baru serta keterlibatan berbagai aktor dalam implementasinya (Aji & Kartono, 2022)

Dalam konteks perusahaan, SDGs berfungsi sebagai panduan global yang mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis tidak hanya demi keuntungan ekonomi, tetapi juga dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Hal ini penting karena perusahaan kini dihadapkan pada tantangan global seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan, yang membutuhkan kontribusi aktif dari sektor swasta dalam penyelesaiannya (Selvakumar, 2025). SDGs mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan

prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka, menciptakan nilai jangka panjang, meningkatkan reputasi, dan memperkuat daya saing. Dalam penelitian ini, SDGs menjadi kerangka acuan yang relevan untuk menilai komitmen dan kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan sosial, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan. Salah satu tujuan SDGs yang paling berkaitan adalah Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, yang menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, integrasi SDGs dalam tata kelola perusahaan, seperti pada kasus PT Indofarma, menunjukkan bagaimana praktik keuangan yang bersih dan bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, sekaligus mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (Aji & Kartono, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi keuangan serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dan perilaku akuntansi di perusahaan publik. Data diperoleh dari sumber kredibel, seperti studi terdahulu dan temuan empiris, guna mengidentifikasi hambatan, strategi implementasi, serta peran aktor kunci dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami bagaimana akuntabilitas dan transparansi memperkuat etika akuntansi dan keberlanjutan Perusahaan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data untuk menyeleksi informasi relevan, penyajian data dengan mengorganisasi temuan ke dalam kategori seperti hambatan, strategi, dan peran aktor kunci, serta penarikan/verifikasi kesimpulan guna memahami hubungan antara akuntabilitas, transparansi, etika akuntansi, dan keberlanjutan perusahaan. (Assyakurrohim et al., 2022).

Commented [G1]: Perlu ada penjelasan, Analisis secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan keberlanjutan, keuangan, dan publikasi resmi perusahaan, berikut disajikan hasil penelitian terkait upaya keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Indofarma Tbk.

1. PT Unilever Indonesia Tbk

PT Unilever Indonesia menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui *Growth Action Plan* (GAP) yang berfokus pada empat pilar: iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Strategi ini diintegrasikan dengan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), serta kebijakan anti-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasok (Unilever, 2024)

Dalam aspek transparansi, Unilever menyediakan label informasi yang jelas, memastikan sertifikasi BPOM dan halal, serta menyediakan kanal *Suara Konsumen* yang aktif. Perusahaan juga menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan sesuai standar GRI dan POJK 51/2017, yang terpisah dari laporan keuangan (Unilever, 2024). Seluruh data dalam laporan tersebut telah diaudit secara independen oleh TÜV Rheinland, menegaskan akuntabilitas terhadap publik dan pemangku kepentingan.

Dari sisi tata kelola, perusahaan menerapkan *Code of Business Principles* yang mencakup etika bisnis, antikorupsi, dan integritas. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi internal perusahaan, tetapi juga bagi mitra dan pemasok di seluruh rantai pasok (Unilever, 2024)

2. PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina menargetkan transformasi menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia pada tahun 2030. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan panas bumi, efisiensi emisi CO₂, serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan dana sebesar Rp17,7 miliar yang difokuskan pada edukasi iklim dan pemberdayaan perempuan (Fitriani et al., 2025)

Transparansi operasional diperkuat melalui publikasi *Sustainability Report* yang memuat emisi karbon, limbah, serta kontribusi sosial perusahaan. Pertamina juga menerbitkan *green bond*, menyediakan *carbon credit* di Bursa Karbon Indonesia, serta membuka akses terhadap informasi publik melalui situs resmi (Fitriani et al., 2025)

Dalam aspek akuntabilitas, Pertamina memperoleh skor GCG sebesar 93,85 (kategori "Sangat Baik"), serta 100% kepatuhan LHKPN. Evaluasi tahunan terhadap kinerja direksi dan komisaris dilakukan secara transparan. Untuk pencegahan korupsi, Pertamina menerapkan ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), menyediakan *Whistleblowing System* (WBS), serta memiliki kebijakan tertulis anti-korupsi dan anti-gratifikasi yang diterapkan secara menyeluruh (Sheva et al., 2025)

3. PT Indofarma Tbk

Berbeda dari dua perusahaan sebelumnya, PT Indofarma tidak mencantumkan inisiatif keberlanjutan dalam laporan terbarunya. Fokus utama perusahaan adalah restrukturisasi keuangan dan kelangsungan usaha setelah terungkapnya kasus manipulasi laporan keuangan dan pailitnya anak perusahaan, PT Indofarma Global Medika (Indofarma, 2025).

Meski demikian, Indofarma mulai menunjukkan transparansi melalui pengungkapan kerugian komprehensif sebesar Rp338 miliar pada tahun 2024, serta defisiensi modal sebesar Rp1,14 triliun. Laporan menyebutkan status pailit, keputusan kasasi Mahkamah Agung, dan komitmen terhadap homologasi (Indofarma, 2025). Auditor eksternal menyoroti keraguan atas kelangsungan usaha dan menegaskan bahwa manajemen telah mendapatkan dukungan dari induk usaha, PT Bio Farma.

Dalam aspek tata kelola, belum ditemukan unit pengendalian korupsi, kebijakan anti-suap, maupun penerapan ISO 37001. Tidak terdapat sistem formal anti-korupsi yang terdokumentasi dalam laporan atau publikasi resmi (Indofarma, 2025).

Commented [G2]: Dari hasil kajian ini, data yang seperti apa? yang dapat ditangkap dan dimaknai sebagai kegagalan akuntabilitas (Dijelaskan pada Pembahasan). Begitu Juga pada Perusahaan yang lainnya.

PEMBAHASAN

PT Indofarma Tbk: Kegagalan Akuntabilitas dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Indofarma Tbk serta anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), menjadi sorotan publik sejak tahun 2019 karena menunjukkan adanya pola kejahatan korporasi yang sistematis dan berlangsung selama bertahun-tahun. Skandal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan BUMN serta kompleksitas penyimpangan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat manajerial. Dugaan awal muncul saat Arief Pramuhanto (AP) menjabat sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk, dengan adanya praktik manipulasi laporan keuangan melalui pencatatan piutang dan uang muka pembelian alat kesehatan fiktif, yang bertujuan menciptakan gambaran seolah-olah kinerja perusahaan sesuai target. Pada periode 2021–2022, Direktur PT IGM, Gigik Sugiyo Raharjo (GSR), juga terlibat dalam penjualan fiktif alat Rapid Test Panbio kepada PT Promedik, yang sejatinya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli, serta menyuruh Head of Finance PT IGM, CSY, membuat klaim diskon fiktif dan mencari pendanaan nonperbankan untuk kebutuhan operasional Indofarma. Puncaknya, pada tahun 2023, PT Indofarma mengalami kerugian besar hingga Rp 605 miliar dengan ekuitas negatif Rp 615 miliar, yang mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem akuntabilitas serta absennya pengendalian internal terhadap potensi korupsi dalam struktur manajemen. Dari perspektif Teori Agensi, krisis ini mencerminkan kegagalan mekanisme pengawasan untuk mengatasi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Ketidakhadiran unit antikorupsi serta belum diterapkannya standar sistem manajemen antisuap seperti ISO 37001 memperlihatkan lemahnya komitmen perusahaan dalam membangun budaya tata kelola yang beretika. Hal ini juga sejalan dengan Teori Keperilakuan Akuntansi, di mana tekanan terhadap keberlanjutan usaha dan pencapaian target kinerja dapat memicu perilaku oportunistik manajerial, terutama dalam pelaporan keuangan (Pitaloka & Trisnaningih, 2022)

Temuan BPK menunjukkan adanya indikasi penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar. Menindaklanjuti hasil audit tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka utama pada 19 September 2024, yakni AP, GSR, dan CSY, yang diduga berperan dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan perusahaan selama periode 2020–2023. Mereka masing-masing ditahan untuk keperluan penyidikan (Humas BPK, 2024). Tidak berhenti di situ, pada 30 Oktober 2024, Kejaksaan juga menetapkan tersangka tambahan, yaitu BPE, yang menjabat sebagai Manager Keuangan dan Akuntansi PT Indofarma Tbk pada tahun 2020 serta Manager Akuntansi dan Keuangan PT IGM pada 2022–2023. BPE diduga ikut serta dalam tindakan melawan hukum bersama para petinggi lainnya. Pada 20 Mei 2024, BPK secara resmi menyerahkan hasil audit investigatif tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Perkembangan terakhir dari kasus ini terjadi pada Februari 2025, ketika PT IGM dinyatakan pailit setelah gagal mencapai kesepakatan dalam proses PKPU yang berlangsung sejak Mei 2024, yang berdampak serius terhadap keberlangsungan operasional dan mengancam sekitar 450 karyawan dengan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan kegagalan Indofarma dalam memberikan kontribusi terhadap sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDG 3 (*Good Health and Well-being*), yang menekankan pentingnya sistem kesehatan yang andal dan bebas dari korupsi, jelas terdampak oleh praktik manipulatif yang menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan dan produk kesehatan dari BUMN farmasi. SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) juga terhambat karena skandal ini meruntuhkan kredibilitas Indofarma sebagai pelaku inovasi di sektor industri strategis, sehingga menghambat kemajuan dan investasi dalam bidang farmasi nasional (Amalia & Indrabudiman, 2024). Sementara itu, SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) yang bertujuan membangun institusi yang

transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, menjadi tidak tercapai karena lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam struktur perusahaan. Dengan kata lain, kasus Indofarma bukan hanya persoalan hukum dan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator serius akan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola perusahaan publik demi mendukung agenda keberlanjutan nasional (Indarto et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah data dapat diinterpretasikan sebagai indikator kegagalan akuntabilitas dalam dimensi keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan. Ketiadaan inisiatif keberlanjutan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan kerugian komprehensif sebesar Rp338 miliar dan defisiensi modal Rp1,14 triliun mengindikasikan lemahnya pengelolaan keuangan serta akumulasi risiko yang tidak terantisipasi. Pernyataan auditor eksternal mengenai keraguan atas kelangsungan usaha, disertai ketergantungan terhadap dukungan induk perusahaan, menegaskan tidak stabilnya fondasi operasional dan finansial perusahaan. Sementara itu, absennya unit pengendalian korupsi, kebijakan anti-suap, dan penerapan standar seperti ISO 37001 menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem tata kelola internal. Secara keseluruhan, data tersebut memperkuat kesimpulan bahwa PT Indofarma mengalami kegagalan akuntabilitas yang bersifat struktural dan sistemik.

PT Pertamina (Persero): Penguatan Transparansi dan Sistem Antikorupsi

Kasus dugaan korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Pertamina kembali mencuat ke publik setelah Kejaksaan Agung RI mengumumkan perkembangan penyidikan pada kuartal pertama tahun 2025. Dugaan korupsi ini berakar sejak tahun 2020, namun baru terungkap secara luas setelah hasil audit investigatif dan pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana investasi dan pengadaan (Pratama, 2025). Salah satu kasus menonjol terjadi pada proyek kilang minyak yang diduga merugikan keuangan negara akibat penggelembungan biaya (mark-up) dan penyalahgunaan wewenang dalam kontrak pengadaan. Pada bulan Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dari kalangan internal perusahaan, termasuk pejabat senior di anak perusahaan Pertamina. Kasus ini semakin kompleks karena juga menyeret pihak swasta yang menjadi mitra dalam proyek strategis tersebut (Puspa Sari & Ramadhan, 2025).

Selama kurun waktu 2020–2024, sejumlah laporan dari media dan lembaga antikorupsi menyebutkan adanya indikasi konflik kepentingan dan lemahnya sistem pengawasan terhadap proyek-proyek besar, seperti pengembangan kilang Balikpapan dan kilang Tuban. Selain itu,

proyek infrastruktur energi yang menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) turut menjadi perhatian publik karena dianggap tidak transparan dalam aspek pembiayaan dan pelaksanaan (Pratama, 2025). Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan audit internal BPKP, ditemukan adanya indikasi pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, serta peran vendor fiktif dalam beberapa kontrak. Proses tender yang tertutup serta keterlibatan perusahaan cangkang menambah daftar persoalan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik penyimpangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi BUMN sebagai pengelola sumber daya public (Sugiarti, 2025).

Pada bulan Mei 2025, hasil audit investigatif atas proyek pengembangan kilang dipublikasikan secara terbatas kepada lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan. Kejaksaan kemudian mengumumkan bahwa total kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah (Pratama, 2025). Seiring dengan proses hukum yang berjalan, publik menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengendalian internal dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan proyek strategis. Kasus ini menjadi titik balik bagi PT Pertamina dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan memperbaiki reputasi yang sempat tercoreng (Sheva et al., 2025). Namun, respons korporasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan tata kelola melalui implementasi SMAP ISO 37001, kanal Whistleblowing, serta laporan keberlanjutan yang memenuhi prinsip ESG. Berdasarkan Teori Good Corporate Governance, sistem pengawasan internal dan eksternal Pertamina mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang efektif. Evaluasi GCG perusahaan mencapai skor 93,85 dengan kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100%. Hal ini mendukung argumen dalam Teori Agensi, bahwa kontrol internal dan transparansi informasi menurunkan risiko asimetri informasi antara manajemen dan pemilik (Fitriani et al., 2025)

Komitmen ini juga tampak dalam partisipasi aktif Pertamina terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), serta SDG 17 (Partnerships for the Goals). Pada SDG 12, Pertamina menunjukkan kontribusinya melalui berbagai upaya efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah berbahaya. Perusahaan menerapkan kebijakan green refinery, mengembangkan produk energi bersih seperti bioavtur dan Pertamina Green Energy, serta berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Data emisi dan jejak karbon dipublikasikan secara terbuka melalui laporan keberlanjutan tahunan dan

partisipasi di pasar karbon nasional (IDXCarbon), yang memperkuat transparansi serta akuntabilitas terhadap konsumsi dan produksi energi nasional.

Sementara itu, pada SDG 16, komitmen Pertamina terhadap prinsip keadilan, institusi yang kuat, dan antikorupsi tercermin dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001, yang mengikat seluruh level organisasi untuk menerapkan etika bisnis secara konsisten (Susilowati et al., 2022). Tersedianya kanal pengaduan (Whistleblowing System), kode etik perilaku, serta mekanisme audit internal dan eksternal menunjukkan langkah konkret dalam membangun sistem kelembagaan yang bersih dan adil. Evaluasi Good Corporate Governance (GCG) yang tinggi serta kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN) menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya dalam menjaga integritas institusi public (Singh & Rahman, 2021).

Adapun kontribusi pada SDG 17 diwujudkan melalui kolaborasi multi-pihak yang dijalankan oleh Pertamina, baik dengan pemerintah, komunitas lokal, perguruan tinggi, maupun sektor swasta global. Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat, riset bersama pengembangan energi bersih, hingga kerja sama pengurangan emisi dengan badan internasional menjadi bentuk nyata kemitraan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi (Aji & Kartono, 2022) Pertamina dalam forum global dan regional untuk perubahan iklim serta pengembangan energi hijau turut memperkuat posisi Indonesia dalam kolaborasi lintas negara untuk mencapai target-target SDGs secara kolektif (Wang et al., 2021).

Kontradiksi antara dugaan praktik korupsi dan penguatan formal sistem tata kelola di lingkungan PT Pertamina mencerminkan kompleksitas akuntabilitas dalam konteks perusahaan milik negara yang mengelola sumber daya strategis. Di satu sisi, keberadaan kerangka akuntabilitas yang kuat—seperti penerapan ISO 37001, sistem whistleblowing, evaluasi GCG dengan skor tinggi, serta kepatuhan pelaporan LHKPN—menunjukkan upaya sistemik perusahaan dalam membangun tata kelola berbasis transparansi dan integritas. Respons korporasi terhadap tuntutan keberlanjutan juga terlihat melalui komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk efisiensi energi, publikasi emisi karbon, dan pengembangan energi terbarukan.

Namun demikian, kasus dugaan korupsi yang terungkap sejak awal 2025, khususnya dalam proyek pengembangan kilang, membuka celah terhadap lemahnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas substantif di lapangan. Indikasi adanya mark-up, vendor fiktif, kontrak tidak transparan, serta keterlibatan perusahaan cangkang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan. Dengan

kata lain, akuntabilitas prosedural yang tampak dalam dokumen dan kebijakan tidak selalu menjamin akuntabilitas substantif dalam praktik manajerial. Hal ini menegaskan argumen dalam Teori Agensi dan Teori Legitimasi, bahwa meskipun perusahaan membangun mekanisme formal untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik, tetap diperlukan pengawasan independen dan budaya organisasi yang kuat untuk mencegah perilaku oportunistik.

Dengan demikian, data yang ada menunjukkan bahwa keberhasilan formal dalam membangun sistem akuntabilitas belum tentu menghilangkan risiko kegagalan akuntabilitas substantif. PT Pertamina dapat dikatakan berada pada posisi ambivalen: satu sisi menunjukkan praktik keberlanjutan dan tata kelola yang patut diapresiasi, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan di tingkat operasional. Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan, tetapi juga memperkuat nilai integritas, independensi pengawasan, serta keterlibatan publik dalam proses evaluasi korporat.

PT Unilever Indonesia Tbk: Strategi Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

Sejak akhir 2023 hingga awal 2024, Unilever Indonesia menghadapi tekanan signifikan akibat kampanye boikot dari masyarakat muslim, yang menuduh perusahaan ini memiliki afiliasi tidak langsung terhadap aksi militer Israel di Gaza (Haq, 2021). Akibatnya, penjualan Unilever di Indonesia anjlok; Reuters mencatat pangsa pasar turun dari 38,5% menjadi 34,9% pada kuartal ketiga 2024 (Dania, 2025). Segmen homecare dan food & refreshment mencatat penurunan volume masing-masing sebesar 20,8% dan 13,3%. Konsumen mulai beralih ke produk lokal seperti Wings dan merek-merek halal lainnya, sementara kepercayaan terhadap merek global terus merosot (Aviv, 2025). Laporan keuangan Unilever Indonesia menunjukkan penurunan penjualan bersih sebesar 6,3% menjadi Rp 38,6 triliun dan laba bersih turun 10,5% sepanjang 2023. Respons perusahaan termasuk penataan ulang saluran distribusi, reposisi harga, dan penguatan citra merek untuk merespons sentimen pasar. Kampanye boikot yang didorong oleh kesadaran sosial ini memperlihatkan betapa pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap nilai-nilai etik dan kemanusiaan (Dania, 2025). Di tengah tekanan ini, Unilever juga menghadapi tantangan reputasi yang berkelanjutan di tengah keterlibatan anak perusahaannya seperti Ben & Jerry's yang secara terbuka menyebut konflik di Gaza sebagai "genosida", memunculkan tensi internal antara arah sosial anak usaha dan kebijakan induk perusahaan.

Sebagai respons terhadap tekanan eksternal yang dipicu oleh kampanye boikot global dan penurunan performa bisnis di Indonesia, Unilever memperkuat strategi keberlanjutannya dengan menekankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), pelaporan keberlanjutan terintegrasi, serta kebijakan perlindungan hak asasi manusia. Langkah ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan normatif menjadi strategi yang berbasis nilai dan kepercayaan jangka Panjang (Hasan et al., 2025). Menurut Teori Keperilakuan Akuntansi, transformasi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan reputasi dan perubahan sosial global yang mendorong peningkatan akuntabilitas sosial serta penerapan etika bisnis yang lebih konkret (Sari, 2021). Keterlibatan pemangku kepentingan, audit independen atas laporan keberlanjutan, serta pendekatan edukatif berbasis komunitas menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam membangun kembali kepercayaan publik yang sempat menurun akibat persepsi negatif. Kode Etik dan Kebijakan Antikorupsi perusahaan juga diperluas penerapannya hingga ke dalam rantai pasok untuk memastikan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab secara menyeluruh (Rimadias et al., 2024).

Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), kontribusi Unilever tercermin secara jelas dalam beberapa tujuan prioritas. Pertama, SDG 12 (Responsible Consumption and Production) terwujud melalui inisiatif pengurangan limbah kemasan plastik sekali pakai, penggunaan bahan baku terbarukan, dan efisiensi energi dalam proses produksi. Unilever juga menjalankan program daur ulang terpadu dan memperkuat edukasi konsumen terhadap pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Kedua, pada SDG 10 (Reduced Inequalities), Unilever menerapkan kebijakan non-diskriminasi yang kuat, termasuk di dalamnya komitmen terhadap inklusi gender, pemberdayaan UMKM lokal, serta perlindungan terhadap pekerja rentan di seluruh rantai pasok global mereka. Ketiga, kontribusi terhadap SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) tampak dari penguatan tata kelola internal melalui transparansi laporan keberlanjutan, mekanisme whistleblowing yang aktif, serta upaya pencegahan korupsi dan pelanggaran etika di tingkat manajemen. Keempat, Unilever juga mendukung SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan dalam pengembangan program sosial dan keberlanjutan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat ekosistem keberlanjutan yang berorientasi pada dampak jangka Panjang (Indarto et al., 2024). Penelitian oleh Haq (2021) turut mendukung temuan ini, menyatakan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan memiliki ketahanan reputasi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi dinamika perubahan sosial global.

Dari hasil kajian ini, terdapat indikasi kegagalan akuntabilitas yang dapat ditangkap terutama dari sisi respons perusahaan terhadap tekanan reputasi dan perbedaan kebijakan sosial antara induk dan anak usaha. Meskipun Unilever Indonesia menerapkan tata kelola dan pelaporan yang transparan, fenomena boikot dan penurunan kepercayaan konsumen mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan persepsi publik terhadap akuntabilitas sosial perusahaan. Tantangan internal tersebut juga menunjukkan perlunya harmonisasi nilai-nilai etika secara konsisten di seluruh entitas bisnis. Akuntabilitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga terkait keselarasan praktik nyata yang dipahami dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kegagalan akuntabilitas muncul dari manajemen risiko reputasi dan komunikasi strategis yang kurang optimal serta implementasi etika bisnis yang belum sepenuhnya menyeluruh di seluruh tingkat organisasi.

Evaluasi Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan publik di Indonesia secara normatif telah menjadi standar operasional, khususnya pada entitas BUMN seperti PT Pertamina dan PT Indofarma. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, terlihat bahwa pendekatan terhadap GCG masih bersifat formalistik dan administratif semata. Skor GCG yang tinggi, sebagaimana dicapai oleh PT Pertamina (93,85 kategori "Sangat Baik"), tidak mampu sepenuhnya mencegah terjadinya praktik korupsi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek strategis nasional, seperti yang ditemukan dalam pengembangan kilang dan proyek pengadaan energi. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara dokumen tata kelola yang ideal dan implementasi nyata di lapangan. Evaluasi GCG yang hanya menitikberatkan pada ketersediaan dokumen, sistem pelaporan, dan pernyataan etika, tanpa mengukur kualitas pelaksanaannya, berisiko menjadikan GCG sebatas *symbolic compliance*, bukan *substantive accountability*.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan justru tampak pada PT Indofarma, di mana absennya unit pengendalian korupsi, ketiadaan sistem pengawasan ISO 37001, dan lemahnya sistem kontrol internal menyebabkan terjadinya korupsi sistematis, manipulasi laporan keuangan, serta kerugian negara yang signifikan. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan ketidakefektifan penerapan GCG, melainkan juga mencerminkan rendahnya kesadaran organisasi terhadap nilai-nilai dasar integritas dan akuntabilitas sebagai pondasi utama tata kelola yang baik. Temuan ini selaras dengan kritik dalam Teori Agensi bahwa ketika pengawasan internal tidak berjalan efektif dan terdapat asimetri informasi antara agen dan prinsipal, maka peluang untuk terjadinya

penyimpangan semakin besar, sebagaimana terbukti dari keterlibatan para pejabat puncak PT Indofarma dalam praktik manipulatif yang berujung pada kebangkrutan anak perusahaan dan ancaman PHK massal.

Sebaliknya, PT Unilever Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Meskipun perusahaan ini juga menghadapi tekanan publik melalui gelombang boikot akibat persepsi afiliasi global terhadap isu geopolitik, Unilever meresponsnya dengan memperkuat pelaporan keberlanjutan yang terverifikasi independen oleh TÜV Rheinland, serta menerapkan *Code of Business Principles* yang bersifat wajib bagi seluruh mitra dalam rantai pasok. Perusahaan ini tidak hanya menempatkan etika bisnis sebagai bagian dari dokumentasi administratif, tetapi menjadikannya sebagai instrumen strategis untuk membangun ulang kepercayaan publik. Upaya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang bersifat substantif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh struktur organisasi, internalisasi nilai etika, serta kesiapan untuk menghadapi tekanan sosial dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif.

Dengan demikian, perbandingan ketiga studi kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG tidak dapat diukur hanya dari dokumen atau skor evaluatif, tetapi dari keberdayaan sistem untuk mencegah penyimpangan, memastikan transparansi, serta membentuk budaya integritas yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sertifikasi seperti ISO 37001, laporan GCG, maupun sistem whistleblowing hanya akan efektif apabila didukung oleh komitmen kepemimpinan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi.

Tantangan Integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Strategi Bisnis Perusahaan

Integrasi prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam strategi bisnis telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan korporasi berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun secara formal perusahaan-perusahaan telah menyatakan komitmennya terhadap pencapaian SDGs, tantangan besar masih muncul dalam bentuk ketidakkonsistenan implementasi, keterbatasan respons terhadap isu sosial, serta minimnya pengawasan terhadap keberhasilan aktual di lapangan. PT Unilever Indonesia merupakan contoh perusahaan yang secara eksplisit mengaitkan strategi bisnisnya dengan empat tujuan SDGs, yaitu SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), dan SDG 17 (Partnerships for

the Goals). Melalui berbagai program efisiensi energi, daur ulang limbah plastik, dan pemberdayaan UMKM lokal, perusahaan ini berupaya menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi, gelombang boikot yang melanda Unilever pada 2023–2024 akibat persepsi afiliasi politik induk global menunjukkan bahwa keberhasilan SDGs tidak hanya bergantung pada indikator internal, tetapi juga pada bagaimana perusahaan membangun dan mempertahankan legitimasi sosial dalam dinamika global yang sensitif.

Dalam konteks PT Pertamina, keterlibatan terhadap SDG 12, 16, dan 17 juga tampak melalui program green refinery, pelaporan ESG, dan sistem pengendalian korupsi berbasis ISO 37001. Namun demikian, kasus korupsi besar di tubuh perusahaan menunjukkan bahwa SDG 16 belum sepenuhnya tercapai secara substansial. Adanya kerugian negara akibat proyek pengadaan yang tidak transparan, konflik kepentingan dalam tender, serta lemahnya pelibatan stakeholder menandakan bahwa keberlanjutan tidak dapat berdiri tanpa pondasi tata kelola yang kuat. Artinya, meskipun pendekatan teknokratis terhadap SDGs seperti laporan karbon dan audit ESG sudah diterapkan, ketiadaan reformasi budaya organisasi akan membatasi efektivitasnya dalam menciptakan transformasi sosial.

Sementara itu, PT Indofarma menjadi contoh konkret dari kegagalan total dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi bisnis. Absennya agenda keberlanjutan dalam laporan tahunan, minimnya transparansi terhadap risiko sosial, serta ketiadaan sistem pelaporan yang kredibel mengakibatkan perusahaan ini gagal mendukung SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), dan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Dalam hal ini, keberlanjutan menjadi agenda yang terabaikan akibat fokus pada restrukturisasi pasca krisis tata kelola dan keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang tidak membangun sistem etika dan akuntabilitas sejak awal, akan kesulitan untuk menyatu dengan semangat SDGs, bahkan saat berada di bawah tekanan regulatif atau sosial.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa integrasi SDGs dalam tata kelola perusahaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif atau administratif, tetapi harus diwujudkan melalui transformasi struktur tata kelola, reformasi budaya organisasi, dan penguatan sistem partisipatif yang menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan yang berhasil tidak hanya melaporkan dukungan terhadap SDGs, tetapi menjadikan tujuan tersebut sebagai kerangka kerja strategis dalam seluruh aspek operasional, pengambilan keputusan, dan pembangunan reputasi jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan bukan hanya menjadi indikator tata kelola yang baik, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi serta pembentukan legitimasi sosial perusahaan. Melalui studi kasus pada tiga perusahaan publik—PT Indofarma Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Unilever Indonesia Tbk—ditemukan bahwa variasi dalam kualitas tata kelola sangat memengaruhi efektivitas perusahaan dalam merespons krisis, mempertahankan kepercayaan publik, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

PT Indofarma menjadi contoh konkret kegagalan akuntabilitas dan transparansi, di mana absennya sistem pengendalian internal dan lemahnya budaya etika menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara yang signifikan. Kegagalan ini mencerminkan rendahnya implementasi prinsip GCG dan berdampak langsung pada pencapaian SDG 3, 9, dan 16. Di sisi lain, PT Pertamina menunjukkan adanya perbaikan struktur tata kelola melalui sistem audit, pelaporan keberlanjutan, dan sertifikasi ISO 37001, meskipun kasus korupsi yang masih terjadi memperlihatkan bahwa reformasi budaya organisasi masih dibutuhkan agar SDG 16 dan 17 benar-benar tercapai secara substantif. Sementara itu, PT Unilever Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih integratif, dengan menggabungkan strategi ESG, pelibatan stakeholder, dan pelaporan keberlanjutan sebagai respons adaptif terhadap tekanan eksternal. Strategi ini berkontribusi pada pencapaian SDG 10, 12, 16, dan 17, sekaligus memperlihatkan bahwa keberlanjutan korporasi memerlukan respons yang berbasis nilai, bukan sekadar kepatuhan formal.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan relevansi Teori Agensi dalam menjelaskan pentingnya pengawasan yang efektif dan transparansi dalam mengurangi konflik kepentingan; Teori Keperilakuan Akuntansi dalam menyoroti bagaimana tekanan sosial dan reputasi memengaruhi keputusan manajerial; serta Teori Good Corporate Governance yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem audit, pelaporan non-keuangan yang kredibel, dan pelibatan aktif stakeholder dalam pengambilan keputusan sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap SDGs. Dengan memperkuat integrasi antara prinsip akuntansi, etika organisasi, dan tanggung jawab sosial, perusahaan publik dapat membangun sistem tata kelola yang bukan hanya patuh secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, N., Khurana, S., & Aggarwal, M. (2020). A Review On Sustainable Business Model: The Future For The Corporate World. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9, 1. www.ijstr.org
- Agwu, U. J., & Bessant, J. (2021). Sustainable Business Models: A Systematic Review of Approaches and Challenges in Manufacturing. *Revista de Administracao Contemporanea*, 25(3 Special Issue). <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200202.en>
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). KEBERMANFAAT ADANYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *JOSR: Journal of Social Research Mei*, 2022(6), 507–512. <http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Amalia, M., & Indrabudiman, A. (2024). STRATEGI SDGS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ABAD 21 PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2023. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 10(No.3). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Anggraeni, V., Achsanta, A. F., & Purnomowati, N. H. (2023). Measuring opportunities: Transforming Indonesia's economy through utilizing natural resources for sustainable development through green economy indicators. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012011>
- Ansori, D. Y., & Kuntadi, C. (2022). Jurnal Multidisiplin Indonesia PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1). <https://jmi.rivierapublishing.id/>
- Arunkumar B. (2022). Role of businesses in a sustainable economy. ~ 25 ~ *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*, 4(1), 25–29. www.marketingjournal.net
- Assyakkurrohm, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Aviv, A. (2025, January 9). *Israel boycotts hit Unilever's Indonesia business as market share drops*. The Jerusalem Post. <https://www.jpost.com/international/article-836837>
- Bagus, I., Narayana, P., Sudiana, W., Made, N., & Pramuki, W. A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Bukhary, T., Pendidikan, J., dan Sains, A., & Putri, D. (2021). *Tarbiyah bil Qalam KORUPSI DAN PRILAKU KORUPTIF*.
- Dania, P. (2025, January 9). *Unilever's Indonesia headache worsens with boycott as local brands seize the day*. TheJakartaPost. <https://www.thejakartapost.com/business/2025/01/09/unilevers-indonesia-headache-worsens-with-boycott-as-local-brands-seize-the-day.html>
- Dimitrova, P. (2022). Practical-applied criteria for transparency of information in annual reports of companies. *Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Informatics*, XXIII C, 93–108. <https://doi.org/10.46687/JEFA4277>
- Edoumiekumo, A. R. (2020). Internal Audit and Fund Misappropriation in the Public Sector of Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-16-08>
- Erna Hendrawati, & Mira Pramudianti. (2020). PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 100.

- Faisal, F., Majid, M. S. A., & Sakir, A. (2020). Agency conflicts, firm value, and monitoring mechanisms: An empirical evidence from Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1822018>
- Falk, M. T., & Roh, T. (2022). Editorial: *Environmental, social, and corporate governance and sustainability*.
- Fitriani, Q., Sugiarti, E., Fadhilah, H., Munyanti Putri, F., & Novaria Misidawati, D. (2025). Analisis Fraud Hexagon dalam Kasus Korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknik Global*, 1(2), 105–118. <https://doi.org/10.63142/ekonosfera.v1i2.176>
- Haq, H. D. (2021). The Effect Of Corporate Social Responsibility On Brand Awareness: The Case Study Of PT. Unilever Indonesia And Non-Governmental Organization (NGO) Spektra Surabaya. In *JSMB* (Vol. 8, Issue 1). <http://journal.trunojoyo.ac.id/jsmb>
- Hasan, I., Singh, S., & Kashiramka, S. (2025). Exploring the financial performance of ESG investing in India: evidence using asset-pricing models. *China Accounting and Finance Review*. <https://doi.org/10.1108/CAFR-12-2023-0153>
- Huckleberry, K. (2023). Assessing the Impact of Audit Quality on Accountability and Transparency among Financial Institutions in the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Finance and Accounting*, 2. <https://doi.org/10.53819/81018102t4130>
- Humas BPK. (2024, May 20). *BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp371 Miliar pada PT Indofarma dan Anak Perusahaan*. BPK RI. https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-indikasi-kerugian-negara-senilai-rp371-miliar-pada-pt-indofarma-dan-anak-perusahaan?utm_source=chatgpt.com
- Husainy, A. S. N., Mangave, S. S., Patil, C. C., & Mane, S. D. (2024). Harmonizing Responsibilities: Challenges and Opportunities in the Integration of Climate Change and Sustainable Development Goals (SDGs). *The Asian Review of Civil Engineering*, 13(1), 30–43. <https://doi.org/10.70112/tarce-2024.13.1.4232>
- Ilham, M. (2022). Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(3), 83–88. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>
- Indarto, S. L., Asmara, G. Y. P., & Purwoko, A. J. (2024). THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SUPPORTING SDGS: A PROPRIETY AND FAIRNESS PERSPECTIVE. *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5(1). <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe02794>
- Iyengar, S. (2024). Assessing the Impact of Social Sustainability Practices in Corporate Social Responsibility Initiatives. *Innovative Research Thoughts*, 10(3), 131–137. <https://doi.org/10.36676/irt.v10.i3.1471>
- Kurniawati, B., Susilaningtyas, Abdullah, S., Widyaswati, R., & Eni Maryanti, I. (2024). GOOD GOVERNANCE OF VILLAGE FUND TO ACHIEVE THE VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)-SYSTEMATIC REVIEW. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* (Vol. 7, Issue 3).
- La Ode, F. (2023). The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 381–391. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2437>
- Lailatul Khikmah, & Agus Purwanto. (2023). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN FAIRNESS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1–13.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>

- Man, D. (2022). *Strengthening the Fight Against Corruption through the Principle of Accountability A de Man**. <https://doi.org/10.17159/1727>
- Mardiyanto, M. (2022). DETERMINAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 7(2), 31–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17945>
- Mishra, M., Desul, S., Santos, C. A. G., Mishra, S. K., Kamal, A. H. M., Goswami, S., Kalumba, A. M., Biswal, R., da Silva, R. M., dos Santos, C. A. C., & Baral, K. (2024). A bibliometric analysis of sustainable development goals (SDGs): a review of progress, challenges, and opportunities. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 11101–11143. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03225-w>
- Mustafa, K., & Nurul, J. (2023). Regulations on Non-Financial Disclosure in Corporate Reporting: A Thematic Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032793>
- Nopriyanto, A., Tinggi, S., & Gici, I. E. (2025). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK. In *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 6, Issue 1).
- Noyo, I. A., Muliati, M., Samir, Y. G., & Kasmawati, K. (2024). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.6310>
- Pardomuan, R. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: PERAN AUDIT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER. *Equilibrium*, 13, 323–336.
- Pitaloka, R., & Trisnarningsih, S. (2022). *ASPEK KEPERILAKUAN DALAM PROSES PENGANGGARAN DI PERUSAHAAN JASA*. 6(2), 2022.
- Pitt, J., Michael, K., & Abbas, R. (2021). Public Interest Technology, Citizen Assemblies, and Performative Governance. In *IEEE Technology and Society Magazine* (Vol. 40, Issue 3, pp. 6–9). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/MTS.2021.3104402>
- Pratama, B. (2025, February 25). *Kronologi dua pejabat Pertamina jadi tersangka baru korupsi minyak mentah, diduga memerintahkan "oplos" atau blending RON 90 jadi Pertamina*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do>
- Purwanti, H., & Yulianti, A. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 2022.
- Puspa Sari, H., & Ramadhan, A. (2025, February 28). *Ombudsman: Korupsi Pertamina Bukti Kegagalan Tata Kelola Pengadaan Barang*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/28/14120541/ombudsman-korupsi-pertamina-bukti-kegagalan-tata-kelola-pengadaan-barang>
- Rachmatullah Putra, L. (2025). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN* (Vol. 19, Issue 1).
- Rakhman, A., Nusri, K., & Chamalinda, L. (2024). PERAN KESADARAN DAN MORALITAS DALAM MEMBENTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Bisnis Dan Industri (EBI)*, 06(01), 42–52. <http://jurnal.cic.ac.id/42>
- Ramdan Lamala, M. I., Domili, A., & Kunci, K. (2023). Analisis Peran Akuntansi Transaksi Masyarakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Tinjauan Literatur. In *Juni* (Vol. 2, Issue 1).
- Rano, A., & Candra, R. (2022). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 1, 49–64.

- Rimadias, S., Putri, V. R., Kamila, N., Putri Destania, K., Ardianto, F., Sari, L. P., & Parlindungan, R. S. (2024). Tangkal Korupsi: Membangun Budaya Integritas Untuk Masa Depan yang Bersih. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 132–140. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.13790>
- Samuel, P. S. (2022). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas. *Jurist-Diction*, 5(5), 1941–1968. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38559>
- Sari, R. C. (2021). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implikasi*. Penerbit Andi.
- Sayekthi, R. (2022). PENGARUH AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. *JURNAL SOSIAL DAN SAINS*. <http://sosains.greenvest.co.id>
- Selvakumar. (2025). *The Role of Technology in Enhancing Social Sustainability* (pp. 275–302). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9740-4.ch010>
- Septiani Putri, D., Saftiana, Y., & Siddik, S. (2023). The Influence of Accountability, Participation, and Transparency of Boss Funds on the Financial Performance of Public Elementary Schools in Palembang City. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 8(1), 329–343. www.harianjogja.com
- Sheva, A., Jericho, C., & Kurniawan, S. D. (2025). DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT PERTAMINA BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Singh, A. P., & Rahman, Z. (2021). Integrating corporate sustainability and sustainable development goals: towards a multi-stakeholder framework. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1985686>
- Sombie, A. (2023). An empirical analysis using new instrumental variable methods of distributional effects of corruption on public expenditures in developing countries. *SN Business & Economics*, 3(3). <https://doi.org/10.1007/s43546-023-00452-1>
- Sugiarti, U. (2025, February 26). *Jejak Skandal Kasus Korupsi di Pertamina dari 2020-2025*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/jejak-kasus-korupsi-di-lingkungan-pertamina-dalam-5-tahun-terakhir-BIRNz>
- Susilowati, E., Joseph, C., Vendy, V., & Yuhertiana, I. (2022). Advancing SDG No 16 via Corporate Governance Disclosure: Evidence from Indonesian and Malaysian Fintech Companies' Websites. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21). <https://doi.org/10.3390/su142113869>
- TEKIN, H., & POLAT, A. Y. (2020). Agency Theory: A Review in Finance. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 1323–1329. <https://doi.org/10.18506/anemon.712351>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN ANGGOTA KOPERASI. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3787–3797. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Unilever. (2024). *Investasi untuk Masa Depan Berkelanjutan Investing for a Sustainable Future 2024*. <https://www.unilever.co.id/investor/laporan-tahunan-keuangan-dan-keberlanjutan/laporan-keberlanjutan/>
- Wang, C. C., Chang, S. C., & Chen, P. Y. (2021). The brand sustainability obstacle: Viewpoint incompatibility and consumer boycott. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13095174>
- Yeremia, N., & Oka, I. M. (2020). Transparency And Accountability As Determinants In The Financial Management Of Universities: A Study On State Universities In Malang City *Jurnal*

- Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 57–72.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Zhu, X. (2021). The Analysis of Agency Theory: A Research for Shuozhou Coal Economy Development. *Academic Journal of Business & Management*, 3(9). <https://doi.org/10.25236/ajbm.2021.030901>
- Zuherman, H., & Nurul. (2025). Peran Akuntansi Lingkungan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Ersi Sisdianto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 433–443. <https://doi.org/10.61722/jemba>